

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Magelang telah memenuhi indikator pertama yaitu kebijakan kapasitas teknis kelembagaan, dan mekanisme penanganan. Ketersediaan relawan berasal dari perorangan, tenaga ahli, lembaga, organisasi masyarakat, dan komponen militer. Setiap tahunnya BPBD mengelola data relawan dan mengkoordinir ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan. Kemudian, sistem komando tanggap darurat telah dibagi dan dikoordinasi oleh BPBD ke dalam lingkup kerja pada setiap OPD demi mencapai hasil penanganan bencana yang lebih efisien. Dokumen rencana operasi juga telah dipersiapkan meski masih dalam bentuk rancangan. Untuk instansi terkecil, SKTD tidak tersedia karena terkendala waktu dalam pembentukannya
- b. Kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Magelang belum memenuhi indikator kedua, yaitu rencana kontijensi bencana dan latihan reguler bencana. Pelatihan evakuasi telah ada dalam berbagai macam bentuk yang umumnya dikoordinir oleh BPBD. Dalam lingkup teknis meliputi pelatihan gabungan antara instansi kebencanaan dan relawan, pelatihan gladi ruang atau tabletop exercise, dan tactical floor game. Dalam lingkup masyarakat, pelatihan dilaksanakan dengan partisipasi OPRB dan LPBD desa. Dalam lingkup lembaga sosial, pelatihan berupa penggunaan

APD, penguasaan jalur evakuasi, dan promosi kesehatan. Namun pada lembaga terkecil daerah tidak memiliki pelatihan evakuasi.

- c. Kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Magelang sudah memenuhi indikator ketiga yaitu cadangan finansial, logistik, dan mekanisme antisipasi. Mekanisme penggalangan bantuan dikelola oleh instansi daerah yang telah disesuaikan dengan lingkup kerjanya, meliputi BAZNAS, CSR, BPKAD, DPPKAD, dan Dinas Sosial. Sementara instansi pada lingkup yang terkecil mengelola bantuannya secara mandiri yang didapat dari masyarakat sekitar, pelaku usaha, dan lembaga sosial. Namun, pada instansi yang secara teknis menangani evakuasi kebencanaan, mekanisme tersebut tidak tersedia karena bukan wewenangnya. Kemudian, anggaran khusus penanganan darurat bencana juga telah dimiliki melalui DID yang dikelola oleh BPBD, BTT, dan APBN. Untuk instansi yang lebih kecil hanya memiliki anggaran bencana secara umum karena anggaran khusus didapatkan dengan prosedur *reimburse*. Hal ini membuat pengelola dan panitia bencana harus menggunakan dana pribadi di awal masa bencana.
- d. Kesiapsiagaan pemerintah kabupaten magelang sudah memenuhi indikator keempat yaitu prosedur yang relevan terhadap pertukaran informasi. SOP dari hasil perpaduan setiap institusi telah ada dengan menyesuaikan tupoksi OPD masing-masing. SOP tersebut menghasilkan Perbup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi dan kebijakan turunan yaitu Review Renkon Gunung Merapi Kabupaten Magelang 2020 oleh BPBD. Pada instansi yang teknis menangani evakuasi memakai SOP internal, protokol kesehatan, dan UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Di instansi yang lebih kecil, SOP belum berbentuk dokumen, sehingga mengandalkan kerja sama antara instansi. Kemudian,

prosedur pencatatan atau perekaman dihimpun ke dalam laman resmi bernama SIKK yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Magelang untuk:

- a. Perlu membuat program khusus pelatihan relawan mengenai penanganan ancaman multibencana agar relawan memiliki bekal pengetahuan sebelum turun ke lapangan.
- b. Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik hingga lingkup terkecil agar semua instansi daerah dapat membentuk satu produk kolaborasi mengenai prosedur penanganan bencana yang relevan demi tercapainya keamanan nasional.
- c. Perlu memberikan pelatihan evakuasi pada seluruh instansi daerah dalam bentuk seminar. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bila ke depannya harus menyumbangkan tenaganya ketika sedang mengalami kekurangan personil saat evakuasi.
- d. Perlu membuat kebijakan dalam penanganan multibencana untuk semua jenis bencana yang terjadi bersamaan dengan pandemi Covid-19.
- e. Perlu mengalokasikan anggaran khusus yang sifatnya untuk bencana tertentu kepada daerah-daerah yang selalu mendapatkan ancaman bencana untuk meningkatkan sinergitas Pemda Kabupaten Magelang.